

ABSTRAK

Penyalahgunaan obat antimo, yang mengandung zat Dimenhidrinat, telah menjadi masalah serius di Indonesia. Kasus-kasus penyalahgunaan obat antimo yang terjadi di Indonesia, terutama di kalangan remaja, menunjukkan bahwa penggunaan obat antimo secara berlebihan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perilaku seseorang. Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Psikotropika mengatur bahwa penggunaan obat-obatan, termasuk obat antimo, hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter dan dilarang untuk disalahgunakan.

Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif di karenakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan obat antimo dapat dikenai dengan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Psikotropika. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atau pembaharuan Undang-undang Psikotropika dan Undang-undang Kesehatan untuk mempertegas terkait dengan penggolongan jenis obat-obatan dan penjualan yang hanya bisa di dapatkan melalui resep dokter. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat. Dengan demikian, dapat diharapkan penjualan obat antimo berlebihan dapat dikendalikan dan kesehatan masyarakat dapat dipertahankan.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Antimo, Obat

ABSTRACT

Abuse of antimo drugs, which contain the substance Dimenhydrinat, has become a serious problem in Indonesia. Cases of antimo drug abuse that occur in Indonesia, especially among teenagers, show that excessive use of antimo drugs or not in accordance with statutory regulations can have a negative impact on a person's health and behavior. In this case, Law Number 36 of 2009 concerning Health and the Psychotropics Law regulates that the use of drugs, including antimo drugs, can only be done based on a doctor's prescription and is prohibited from being misused.

The research method in this writing was carried out using a normative juridical approach because this research uses a concept that is included in the legal discipline, namely the concept of criminal responsibility. With this approach, examine or analyze secondary data in the form of secondary legal materials by understanding law as a set of regulations or positive norms in the legal system that regulates human life.

From the results of the analysis, it can be concluded that misuse of antimo drugs can be subject to criminal sanctions in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health and the Psychotropics Law. Therefore, it is necessary to amend or update the Psychotropics Law and the Health Law to clarify the classification of types of medicines and the sale of which can only be obtained through a doctor's prescription. In addition, a more holistic approach is needed, involving education, community empowerment, and increasing awareness of the dangers of drug abuse. In this way, it can be hoped that excessive sales of anti-mo drugs can be controlled and public health can be maintained.

Keywords : Abuse, Antimo, Drugs